

EVALUASI PROGRAM SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUBU RAYA

Widiyaka¹, Netty Herawati², Martoyo³

*Program Studi Administrasi Negara
Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan mengkaji secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi dalam proses program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dari segi proses belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan prosedur serta fasilitas, sarana dan prasarana yang digunakan kurang dimanfaatkan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya telah dilakukan melalui tahap sosialisasi kepada guru-guru dan peran implementor dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya adalah sebagai pembina baik secara langsung maupun tidak langsung telah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program, Kebijakan, Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Seiring dengan tuntutan perubahan, sejak tahun 2005 perhatian Pemerintah kepada para guru sudah jelas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia

¹ Kepala Sub Bagian Kebijakan Aparatur dan Analisis Jabatan

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru yang sudah lulus sertifikasi tahun 2010 sampai 2011 jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kubu Raya berjumlah 1023 orang, sedangkan khusus Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang sudah lulus sertifikasi berjumlah 469 orang dari 653 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sedangkan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang memenuhi kualifikasi daftar sertifikasi tahun 2012 adalah 27 orang dari 184 guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum sertifikasi (Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, 2012).

Sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009, merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik ini diberikan kepada guru yang memenuhi standar profesional guru. Standar profesional guru tercermin dari uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan. Sertifikasi pendidik diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Beban belajar pendidikan profesi untuk guru pada satuan pendidikan setingkat SMP atau yang sederajat adalah 24 sampai 40 satuan kredit semester.

Muatan pendidikan profesi guru dalam jabatan meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Bobot muatan kompetensi disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yaitu untuk lulusan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dititik beratkan pada penguatan kompetensi profesional. Sedangkan untuk lulusan sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) non-kependidikan dititik beratkan pengembangan kompetensi pedagogik. Program sertifikasi profesi diakhiri dengan uji sertifikasi pendidik yaitu melalui ujian tertulis dan ujian kinerja. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik yang mencakup ujian kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sertifikat pendidik dianggap sah setelah mendapatkan nomor registrasi unik dari Departemen Pendidikan Nasional.

2. Permasalahan

Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana proses evaluasi program sertifikasi guru dalam jabatan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya”.

3. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini yaitu:

- a. Evaluasi proses pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan sekolah menengah pertama negeri;

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi proses pelaksanaan program sertifikasi guru dalam jabatan sekolah menengah pertama negeri

4. Tinjauan Pustaka

Menurut Anderson (dalam Islamy, 2001 : 17) “*policy is a purposive course of action followed by on actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tindakan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Pandangan yang dikemukakan oleh James E. Anderson mengindikasikan bahwa sesungguhnya kebijakan tersebut diambil untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi. Walaupun para tokoh kadangkala memberikan definisi yang beragam tentang kebijakan, namun pada intinya memiliki kesamaan yang menyangkut suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Selanjutnya Thomas R. Dye (dalam Islamy, 2001 :18) mendefinisikan kebijakan negara sebagai “*whatener governments chosse to do not to do*” (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Berdasarkan definisi tersebut mengisyaratkan bahwa apa yang telah dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu harus ada tujuan yang jelas dan meliputi semua tindakan. Begitu pula apabila pemerintah memilih tidak melakukan sesuatu itupun merupakan kebijakan. Kebijakan secara harfiah berkaitan dengan sikap dari pemerintah atau pihak penguasa untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tindakan atau sikap yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan dan apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka pasti ada tujuan yang hendak dicapai.

Sementara Carl Friedrich (dalam Wahab. 2003 : 3) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kegagalan proses implementasi akan berpengaruh pada pencapaian suatu kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan diperlukan adanya kegiatan evaluasi kebijakan yang dapat menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Berbagai pandangan mengenai evaluasi, salah satu yang mempertahankan konsep evaluasi sebagai fungsi organik manajemen dan administrasi adalah Siagian (1985:141) yang mengemukakan bahwa:

“Evaluasi atau penilaian adalah fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir. Definisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai”.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, lebih lanjut diuraikan bahwa beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Evaluasi merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan matinya suatu organisasi.
- b. Evaluasi adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian merupakan kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen.
- c. Evaluasi menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai oleh administrasi dan manajemen.

Berdasarkan pengertian evaluasi diatas, dapat dipahami bahwa evaluasi adalah kegiatan yang saling berkaitan yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan suatu kegiatan.

Menurut Umar (2002:1), evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih diantara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu apabila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh.

Dunn (2000:30) mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian. Evaluasi mempunyai fungsi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan atau program, dalam hal ini mengungkap seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dapat dicapai.

Adapun indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn (2000:30) antara lain : 1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, 2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah, 3. Penerataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda, 4. Responsibilitas, apakah hasil kebijakan memuat preferensi/nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka, dan 5. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

Penjelasan diatas menyiratkan bahwa seorang evaluator kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu ia juga harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Kemampuan evaluator sangat menentukan apakah hasil evaluasinya dijadikan oleh pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah kebijakannya akan diteruskan di ubah atau dihentikan. Keputusan keputusan yang di ambil atas dasar studi evaluasi .

Adapun prosedur evaluasi menurut Umar (2002:34), bahwa proses suatu evaluasi pada umumnya memiliki tahapan-tahapannya sendiri, walaupun tidak selalu sama tetapi yang lebih penting adalah bahwa prosesnya sejalan dengan fungsi evaluasi itu sendiri. Adapun proses evaluasi meliputi: (1) menemukan apa yang akan dievaluasi, (2) merancang desain kegiatan evaluasi, (3) pengumpulan data (4) pengolahan dan analisis data, (5) laporan hasil evaluasi.

Menurut Putra (2001 : 97-99) pada dasarnya ada lima faktor yang mempengaruhi pemanfaatan hasil evaluasi publik yaitu karakteristik informasi, cara pengkajian, struktur masalah, struktur birokrasi dan politik, interaksi antara pelaku kebijakan. Karakteristik informasi, hal ini hasil yang perlu diperhatikan ialah informasi harus jelas, lengkap dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan baru, konkrit dan praktis cara penyajiannya dimaksudkan pelaku evaluasi kebijakan publik benar-benar mereka memiliki kompetensi cukup memadai.

Wibawa (1994 : 9) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bermaksud mengetahui 4 (empat) aspek yaitu :(1) proses pembukaan kebijakan, (2) proses implementasi, (3) konskuensi kebijakan, dan (4) efektivitas dampak kebijakan. Berkaitan dengan evaluasi tersebut, Wibawa (1994 : 8) juga mengemukakan bahwa ada beberapa persoalan yang harus dijawab oleh suatu kegiatan evaluasi yaitu : a. Apakah sumber daya yang menjadi input program telah cukup memadai untuk mencapai tujuan?, b. Apa standar implementasi yang baik menurut kebijakan tersebut ?. c. Apakah kegiatan dengan dilakukan sesuai standar efisiensi dan ekonomi, d. Apakah uang digunakan dengan jujur

dan tepat?, e. Apakah kelompok sasaran memperoleh pelayanan dan barang seperti yang didesain dalam program?.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang evaluasi kebijakan, Fadillah Putra (2001:95-96) mengatakan bahwa fungsi dari fungsi evaluasi kebijakan publik pada dasarnya terdapat 3 (tiga) hal pokok yaitu : (1) memberi informasi yang valid tentang kebijakan, (2) untuk menilai kelayakan tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi, (3) untuk memberikan sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologinya.

Langbein (1980:6) mengemukakan bahwa ketika semua penelitian evaluasi memperhatikan keberhasilan program, beberapa studi memdefinisikan keberhasilan dalam bentuk hasil/akibat program, ketika studi lain berfokus pada proses dengan mana program dilaksanakan. Selain itu menurut Langbein, tahap evaluasi yang merupakan tahap penilaian terhadap program yang dilaksanakan. Langbein mengatakan bahwa tipe penelitian evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu deskriptif dan kausal.

Sementara itu, Langbein (1980 :7), mengemukakan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan evaluasi yaitu proses evaluasi mengacu pada pertanyaan-pertanyaan : a. Apakah program sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?, b. Fasilitas sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam melaksanakan program?, dan c. bagaimana mereka penggunaannya?

Hasil / *Outcome* yang diharapkan pada penelitian evaluasi kebijakan diharapkan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : (1) Siapa saja yang berpartisipasi / terlibat dalam program itu ? (2) Apakah program tersebut mencapai / menjangkau kelompok sasaran ? (Langbein 1980 :7)

Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode sebab akibat, hasil/outcome yang diharapkan pada penelitian evaluasi kebijakan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah program memberikan hasil yang diinginkan atau tidak?
2. Cara yang bagaimana implementasi program dapat memberikan hasil yang terbaik? (Langbein 1980 :7)

Sehubungan dengan penelitian evaluasi program sertifikasi guru dalam jabatan guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu Raya, maka penelitian ini diarahkan kepada proses evaluasi kebijakan guna melihat apakah program sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu Raya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan fasilitas sarana dan prasarana apa saja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program dan bagaimana penggunaan sarana prasarana tersebut oleh para guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu Raya.

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat 2, UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1, UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut, secara tegas menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak Pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arah kebijakan di atas, Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Pasal 8 UU RI No 14, 2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus memiliki

kualifikasi akademik minimal D4/S1 dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Kualifikasi akademik minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi.

Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru,
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan, (Dirjen PMPTK, 2009 : 8).

Sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru Pasal 65 huruf (b) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola ; (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung. Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Secara garis besar, semua guru yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti sertifikasi, baik Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen tidak membedakan guru menurut unit organisasinya, terutama yang berkaitan dengan tunjangan profesi, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus. Berdasarkan Undang-Undang tersebut muncul istilah guru dalam jabatan. Pengertian guru dalam jabatan, menurut Sujanto (2009: 11) adalah “guru yang secara resmi telah mengajar pada suatu satuan pendidikan yang mempunyai kewajiban untuk mengikuti sertifikasi guru”. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan dengan mengumpulkan data diantaranya berupa ijazah yang menunjukkan kualifikasi akademik, sertifikat, piagam atau surat keterangan dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan serta dalam mengikuti lomba dan karya akademik. Berkaitan dengan peserta sertifikasi, menurut Sujanto (2009:17), beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah” persyaratan dan teknis mengikuti proses sertifikasi diantaranya : a) menentukan guru peserta sertifikasi, b) kriteria dan persyaratan peserta, c) teknik mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan”.

Mengingat kuota peserta sertifikasi tiap tahun terbatas, dan jumlah guru yang memenuhi persyaratan kualifikasi akademik minimal bervariasi, maka Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memprioritaskan : (1) masa kerja sebagai guru , (2) Usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008, belum memasuki usia 60 tahun, memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik

pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK) . Kemudian persyaratan Khusus untuk uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio.

Guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individu maupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah. Peranan guru dalam keseluruhan program pendidikan di sekolah diwujudkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berupa perkembangan siswa secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan guru sebagai agen pembelajaran di sekolah. Menurut Sagala (2009:38) meliputi :

“Profesionalisme guru adalah sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka, Seorang profesional mempunyai keahlian dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya.”.

Istilah profesionalisme berasal dari kata *professio*, dalam bahasa Inggris *professio* memiliki arti sebagai berikut : *A vocation or occupation requiring advanced training in some liberal art or science and usually involving mental rather than manual work, as teaching engineering, writing, etc.* (Barnes, 1997 :163). Dari kata profesional tersebut melahirkan arti *professional quality, status, etc* yang secara komprehensif memiliki arti lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang memiliki kemampuan tertentu pula (Sagala, 2009 :22).

Menurut pandangan Tjokrowinoto, (2006 : 191) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme adalah “kemampuan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan fungsinya secara efisien, inovatif, lentur, dan mempunyai etos kerja tinggi“. Menurut Pendapat tersebut kemampuan guru lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan pembangunan pendidikan, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

Masalah penting dan sangat mendasar bagi setiap organisasi agar dapat menyiasati perubahan dan kuantitas sumber daya manusia, hal ini dapat dilihat dari sikap serta perilaku guru apakah secara positif dan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik. Pengelompokan dalam pembagian tugas dalam bekerja didasarkan kepada spesialisasi yang seharusnya ditunjang serta didukung oleh tenaga profesional yang handal dan berkemampuan memadai. Hal ini tentunya dengan adanya perencanaan awal serta kemauan pihak yang berkompeten untuk mengadakan profesionalisme guru melalui sertifikasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan bentuk kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini, termasuk berbagai tipe penelitian sehingga ditemukan hubungan yang mungkin terjadi diantara variabel-variabel. Sejalan dengan permasalahan yang dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran tentang suatu fenomena dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikannya sehingga pada akhirnya dapat mendeskripsikan proses sertifikasi dalam jabatan sekolah menengah pertama negeri di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah:

1. Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu
2. Raya yang sudah ikut sertifikasi guru dalam jabatan ,
3. Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Kubu Raya yang masuk daftar kualifikasi sertifikasi guru dalam jabatan,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya,
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar,
6. Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik,
7. Tim Sertifikasi Guru Kabupaten Kubu Raya dan Tenaga Kependidikan (PMPTK),
8. Kepala Sekolah,
9. Pengawas Sekolah.

Penentuan subyek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik bertujuan (*purposive*), artinya informan dipilih karena berkaitan erat dengan sertifikasi guru dalam jabatan sekolah menengah pertama negeri, yang lebih banyak mengetahui permasalahan atau yang terlibat langsung dalam permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Teknik utama pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

- a) Teknik wawancara, yaitu teknik dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subyek penelitian guna pengumpulan dan menggali data primer.
- b) Observasi partisipan, (*participant observation*), yaitu pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan.
- c) Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data melalui dokumen resmi dari lembaga/organisasi yang telah melaksanakan program sertifikasi guru dalam jabatan, seperti arsip-arsip, berkas laporan, dokumen perencanaan, rencana strategis, perencanaan pendidikan yang sudah ada, peraturan, foto-foto kegiatan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif artinya setelah data-data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah tersebut. Matthew B. Miles, A Michael Huberman (1992) menyatakan bahwa dalam analisis kualitatif, data yang muncul adalah bukan rangkaian angka-angka, akan tetapi berupa kata-kata yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai cara misalnya dengan observasi, wawancara, intisari dokumen, pita dokumen, dan biasanya diproses melalui pencatatan pengetikan penyuntingan tetapi analisisnya tetap menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Tahap analisis data menurut Moleong (2004: 103) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Sebagai konsep dasar langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, pertama-tama mengorganisasikan data, data yang terkumpul banyak sekali yang terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen berupa laporan dan sebagainya. Sementara pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu kegiatan proses penghalusan atau pemulihan data yang diperoleh di lapangan, proses tersebut untuk lebih menyederhanakan data yang diperoleh dengan memberi kode, mengklasifikasi, menelusuri tema-tema, membuat gugus, menulis memo, dan memilah-milah bagian-bagian yang tidak relevan dengan fokus penelitian.

c. Penyajian data

Penyajian data adalah setelah kegiatan reduksi dilakukan, kemudian data tersebut disajikan menjadi kumpulan informasi yang telah disusun, sehingga dari informasi tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara yang akan diuji lebih lanjut untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan. Pada umumnya penyajian data disajikan dalam bentuk narasi dan tidak menutup kemungkinan penyajian data dapat dilakukan dengan gambar-gambar matrik agar lebih mudah dimengerti semua pihak.

d. **Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir, dari suatu analisis data yang berusaha mencari arti terhadap data yang disajikan dan berusaha menghubungkan data dengan gejala sosial lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Langkah-langkah Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan langkah-langkah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini juga dikemukakan oleh Tim Sertifikasi Kabupaten Kubu Raya (Hasil Wawancara pada hari Kamis Tanggal 3 Mei 2012) bahwa langkah-langkah sertifikasi di Kabupaten Kubu Raya, meliputi sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, penyeleksian calon peserta (guru) oleh Tim Kabupaten, Penetapan peserta (guru) oleh Kepala Dinas Pendidikan, menyusun portofolio, verifikasi berkas portofolio, mengirim portofolio peserta ke Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Tanjungpura, penilaian portofolio oleh Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Tanjungpura, pengumuman hasil penilaian, menerima sertifikat dan melengkapi persyaratan bagi yang lulus, pengajuan tunjangan profesi, menerima tunjangan profesi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikemukakan langkah-langkah sertifikasi guru dalam jabatan sebagai berikut :

1. **Sosialisasi oleh Dinas Pendidikan**

Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya sebagai leading sektor dari Pemerintah daerah membentuk Tim, yakni tim sertifikasi Kabupaten. Salah satu dari tugas tim sertifikasi Kabupaten adalah melaksanakan sosialisasi.

Kemudian sosialisasi ditegaskan melalui Petunjuk Teknis pelaksanaan sertifikasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (2009:12), yaitu : Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru di wilayahnya. Materi sosialisasi antara lain : (1) prosedur dan tata cara pendaftaran, (2) prosedur dan tata cara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait, (4) syarat mengikuti sertifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen, (6) jadwal penyerahan portofolio.

2. **Seleksi Peserta (Guru) oleh Tim Sertifikasi Kabupaten**

Tim sertifikasi Kabupaten melaksanakan seleksi dengan membuat daftar skala prioritas peserta sertifikasi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) . Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, dan pengawas. Berdasarkan hasil wawancara dapat diasumsikan guru yang mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik minimal S1 atau D4.

3. **Menyusun Portofolio**

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui penilaian portofolio. Penilaian portofolio tersebut merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian kumpulan dokumen yang mendeskripsikan :

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan

- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial

Dari wawancara dengan guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat disimpulkan bahwa penyusunan portofolio telah dilaksanakan dengan baik dimana hal tersebut merupakan kegiatan mengumpulkan dokumen selama bertugas mengajar yang mendeskripsikan : Kualifikasi Akademik, Pendidikan dan Pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, serta penghargaan yang relevan dengan bidang kependidikan.

4. Verifikasi Berkas Portofolio

Verifikasi berkas portofolio peserta perlu dilakukan guna mengecek :

- a. Kesesuaian peserta dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Kesesuaian nama peserta dengan S K penetapan peserta sertifikasi guru.
- c. Kesesuaian nomor peserta dengan nomor urut pada SK penetapan.
- d. Kesesuaian bidang studi yang disertifikasi dengan kode pada nomor peserta.

5. Pengiriman Berkas Portofolio

Setelah berkas portofolio sudah diverifikasi dan sudah memenuhi kuota maka dikirim ke Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura Pontianak. Pada langkah ini, tim sertifikasi Kabupaten menyatakan bahwa semua berkas portofolio peserta sertifikasi Kabupaten Kubu Raya diantar dan dibawa langsung oleh anggota tim sertifikasi Kabupaten ke Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura Pontianak.

6. Penilaian Portofolio

Portofolio yang diterima Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) dinilai oleh dua asesor yang memiliki Nomor Induk Asesor (NIA) dan telah ditetapkan sesuai dengan kewenangannya. Langkah penilaian portofolio telah dilaksanakan dengan baik oleh asesor Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjungpura Pontianak. Hal ini dibuktikan bahwa semua berkas yang dikirim ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Tanjung pura dinilai dan ada tindak lanjutnya berupa hasil penilaian portofolio masing-masing peserta sertifikasi.

7. Pengumuman Hasil Penilaian

Guru yang memiliki nilai portofolio diatas batas minimal (850) dinyatakan lulus penilaian portofolio dan berhak menerima sertifikat pendidik. Namun bagi guru yang hasil penilaian portofolionya memperoleh nilai kurang sedikit dari batas nilai minimal diberi kesempatan untuk melengkapi portofolio. Setelah lengkap guru dinyatakan lulus dan berhak menerima sertifikat pendidik. Bagi guru yang memperoleh nilai jauh dibawah batas minimal lulus wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi guru yang akan dilaksanakan Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) yaitu Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pada akhir diklat profesi guru, dilakukan ujian dengan materi uji mencakup empat kompetensi guru. Bagi guru yang lulus ujian berhak menerima sertifikat pendidik, dan guru yang belum lulus diberi kesempatan untuk mengulang materi diklat yang belum lulus sebanyak dua kali kesempatan.

8. Melengkapi Persyaratan Bagi yang Lulus

Setelah peserta dinyatakan lulus kemudian melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Foto copi Surat Keputusan yang mencantumkan gaji terakhir, Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir, atau Surat Keputusan kenaikan gaji berkala terakhir, atau leger gaji bulan terakhir yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah yang bersangkutan.
- b. Surat keterangan beban kerja
- c. Surat keterangan tugas tambahan bagi guru yang diberi tugas tambahan.
- d. Foto copi nomor rekening bank yang masih aktif.
- e. Foto copi Surat Keputusan (SK) sebagai guru tetap dari yayasan atau satuan pendidikan bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di sekolah swasta.

9. Pengajuan Tunjangan Profesi

Setelah berkas setiap peserta sudah lengkap dan sudah diverifikasi oleh kepala sekolah dan Tim sertifikasi Kabupaten, selanjutnya semua berkas dikirim ke Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Pontianak untuk diteruskan ke Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Jakarta.

10. Menerima Tunjangan Profesi

Peserta menerima berita melalui Tim sertifikasi Kabupaten bahwa uang tunjangan profesi sudah dikirim ke rekening bank masing-masing dan sudah dapat diambil.

B. Peran Implementor dalam Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Peran implementor dalam sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari tugas dan fungsi tim sertifikasi guru Kabupaten Kubu Raya. Implementor belum melaksanakan tugas dengan baik, hal ini terlihat dari aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam hal melaksanakan sosialisasi pada guru dan kepala sekolah, menyeleksi dan merangking calon peserta sesuai kuota, mengusulkan penetapan calon peserta sertifikasi pada kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Kubu Raya, melaksanakan pembimbingan penyusunan portofolio bagi calon peserta sertifikasi yang telah ditetapkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya. Sementara aktivitas yang dilaksanakan kurang, berkaitan dengan masalah yang memfasilitasi biaya transportasi bagi peserta Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) dikatakan kurang karena tidak ada alokasinya dananya, dan pengawasan pembayaran tunjangan profesi dikatakan cukup karena masih ada keterlambatan dalam pembayaran dan pengawasan yang dilakukan belum terlihat secara optimal. Jadi peran implementor dalam penerapan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya belum maksimal karena dirasakan oleh peserta sangat membantu seluruh rangkaian proses sertifikasi guru dalam jabatan. Mekanisme penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan dimulai dari kegiatan penyusunan kuota Kabupaten, sosialisasi pada tim sertifikasi guru di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten, penetapan peserta, mengisi format A1, dan pengolahan data format A1.

Berdasarkan hasil observasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu : 1) Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), 2). Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK), 3) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), 4) Dinas Pendidikan Provinsi, 5). Dinas Pendidikan Kabupaten, dan 6) Guru. Berdasarkan keterangan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2012, bahwa kegiatan pendidikan dan latihan yang pernah

diikuti oleh guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional. Workshop yang minimal dilaksanakan delapan jam dan menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini.

Hasil temuan di lapangan dan diperkuat dengan hasil wawancara pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru menerangkan bahwa pedoman penyusunan portofolio sertifikasi guru pembelajaran paling sedikit memuat rumusan tujuan/kompetensi, pemilihan materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses hasil belajar. Bukti fisik perencanaan pembelajaran berupa dokumen perencanaan pembelajaran (RPP/RP/SP) hasil karya guru yang bersangkutan sebanyak Lima Kompetensi Dasar (KD) yang berlainan. Khusus untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor, dokumennya berupa Program Pelayanan Bimbingan dan Konseling (PPBK) yang akan dilaksanakan.

Kemudian didukung oleh studi dokumentasi terhadap program Bimbingan Konseling, bahwa program pelayanan bimbingan dan konseling ini memuat : nama program, lingkup bidang (pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, akhlak mulia/budi pekerti), yang di dalamnya berisi tujuan, materi kegiatan, strategi, instrumen dan media, waktu kegiatan, biaya, rencana evaluasi dan tindak lanjut. Bukti fisik program pelayanan bimbingan dan konseling berupa dokumen program pelayanan bimbingan pendidikan/belajar, karier, pribadi, sosial, dan akhlak mulia/budi pekerti yang dibuat oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengawas sekolah pada Selasa tanggal 12 juni 2012 diperoleh keterangan bahwa kinerja guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan pembelajaran tahapan pra pembelajaran meliputi : pengecekan kesiapan kelas dan apersepsi, kegiatan inti meliputi : penguasaan materi, strategi pembelajaran, pemanfaatan media/sumber belajar, evaluasi, penggunaan bahasa, dan penutup meliputi : refleksi, rangkuman dan tindak lanjut. Bukti fisik pelaksanaan pembelajaran berupa dokumen hasil penilaian oleh kepala sekolah dan/atau pengawas terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih ada guru yang tidak mau menggunakan tahapan tersebut diatas.

Seiring dengan hal tersebut dan diperkuat dengan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian dan pengawasan dari Kepala Sekolah terhadap kompetensi kepribadian dan sosial meliputi : ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan didukung dengan studi dokumentasi, mengenai prestasi akademik Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri adalah prestasi yang dicapai guru dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara, baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

C. Tingkat Perubahan yang Diinginkan dari Kebijakan Pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Adapun perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya yang diungkapkan oleh Ketua Tim Sertifikasi yang sudah disertifikasi dan memperoleh sertifikat pendidik diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan mutu akademis maupun non akademis. Yang dimaksud adanya peningkatan perubahan

berdampak positif seperti adanya perubahan perilaku yang positif, bertambah disiplin, bertambah bertanggung jawab, semakin profesional, perangkat pembelajaran semakin lengkap, motivasi kerja meningkat, dapat semakin giat untuk mengembangkan diri sesuai perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP) , perubahan yang diinginkan dari kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Mutu Pendidikan

Ada yang perlu dikaji secara mendalam untuk memberi jaminan bahwa sertifikasi dapat meningkatkan kualitas kompetensi guru dan kualitas pendidikan.

2. Adanya Pembinaan Setelah Sertifikasi

Pembinaan guru berlangsung secara kontinyu, karena prinsip yang paling dasar adalah guru merupakan *a learning person*, belajar sepanjang hayat. Sebagai guru profesional dan telah menyandang sertifikat pendidik, guru mempunyai kewajiban untuk mempertahankan profesionalitasnya sebagai guru. Pembinaan profesi guru secara kontinyu menggunakan wadah guru yang sudah ada, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan guru di Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bukan untuk menyelesaikan permasalahan pengajaran yang dialami guru dan berbagi pengalaman mengajar antar guru.

3. Guru Mengetahui Psikologi Siswa

Interaksi antara guru dan siswa hendaknya merespon dengan baik dan langsung pada kebutuhan, keinginan dan pesan siswa, dan menyesuaikan respon terhadap perbedaan style dan kemampuan siswa, guru hendaknya memberi banyak kesempatan pada siswa untuk komunikasi, memfasilitasi keberhasilan siswa menyelesaikan tugas berupa dukungan, perhatian, kedekatan fisik dan dorongan. Orang dewasa memahami bahwa siswa belajar melalui *trial and error*, bahwa kesalahpahaman siswa mencerminkan cara perkembangan berfikirnya. Guru seharusnya selalu memperhatikan tanda-tanda siswa yang mengalami depresi dan mengerti cara bagaimana membantu siswa cara menghadapinya. Orang tua merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk anaknya. Orang tua sebaiknya selalu memperhatikan tentang kebutuhan anaknya. Keputusan penting tentang anak, misalnya membantu pendaftaran sekolah anaknya. Pemahaman peran dan kebutuhan anak dapat dikatakan bukanlah sesuatu yang mendapatkan perhatian besar dari masyarakat dalam strata apapun, dari rendah sampai yang tinggi, Biasanya anak hanya mendengar, dan tidak untuk didengar, sehingga tidak jarang adanya pemaksaan terhadap anak. Orang tua sering memaksakan anaknya untuk ikut kegiatan yang sebenarnya tidak diminati anak.

4. Sekolah yang Ideal

Dalam perkembangannya dunia pendidikan, orang tua ingin menyekolahkan anaknya di sekolah ideal, Sekolah berada dilingkungan masyarakat, untuk membentuk sekolah ideal, kita harus mengetahui dan menggali keperluan apa yang sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Pengertian lingkungan bukanlah mempunyai arti yang sempit, tetapi dalam arti semua lingkungan masyarakat yang luas yang dapat berinteraksi dengan pendidikan tersebut.

D. Faktor Pendukung Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan

1. Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Meningkatkan Motivasi Guru

Salah satu dampak dari program sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 16 menyatakan bahwa guru

yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, baik guru pegawai negeri sipil maupun swasta dibayar oleh pemerintah.

Meningkatkan kesejahteraan guru merupakan dampak dari sertifikasi guru dan bukanlah merupakan tujuan yang utama dari sertifikasi guru dalam jabatan, tetapi ini diharapkan menjadi motivasi bagi guru. Seperti pernyataan dari guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya bahwa “motivasi saya mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan supaya memperoleh pengakuan sebagai guru yang profesional”.

Muncul kesadaran guru untuk meningkatkan dan mengembangkan diri menuju guru yang profesional. Hal ini diungkapkan oleh Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya (Hasil Wawancara : 4 Juli 2012) menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan, guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya mempunyai keinginan untuk lebih giat mengajar, membuat perangkat dan analisis mengajar menjadi lebih lengkap, lebih disiplin dalam mengajar, lebih giat menambah pengetahuan, mengajar 24 jam pelajaran seminggu, yang belum memenuhi standar mau melanjutkan kuliah ke (S1). Adanya sertifikasi guru dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan profesionalisme guru”

2. Meningkatkan Kesejahteraan dan Martabat Guru

Dengan bekal pendidikan formal dan adanya berbagai kegiatan yang diikuti oleh guru, yang ditunjukkan dari dokumentasi data yang dikumpulkan dalam proses sertifikasi, guru dapat mentransfer lebih banyak ilmu yang dimiliki siswa. Jika guru telah memperoleh pengakuan sebagai guru yang profesional, dengan dibuktikan adanya “sertifikat pendidik” dan telah dihargai dengan diberi tunjangan profesi satu kali gaji pokok, secara psikologis kondisi itu dapat meningkatkan harkat dan martabat guru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Guru Mendukung Program Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Para guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya sangat antusias menyambut dengan baik adanya kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu guru yang sudah bersertifikasi di Kabupaten Kubu Raya (Hasil wawancara : 24 Mei 2012) menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan, Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat mendukung program ini. Kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan yang merupakan program pemerintah pusat sudah lama ditunggu implementasinya oleh guru di seluruh Indonesia, karena salah satu dampak dari program sertifikasi guru dalam jabatan yaitu dapat menambah kesejahteraan dan penghasilan setiap bulannya sebesar satu kali gaji pokok”

Akibat adanya program kebijakan sertifikasi, pemerintah mau tidak mau menghargai guru dengan memberikan tunjangan profesi dan guru merasa dihargai. Sekarang ini masih ada guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Kubu Raya yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga tidak dapat tunjangan profesi. Meskipun demikian guru tetap menyambut baik dan mendukung adanya kebijakan program sertifikasi guru dalam jabatan, sebab mereka mempunyai harapan bahwa masa mendatang ketika telah memenuhi syarat, juga akan mendapatkan tunjangan profesi.

E. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

1. Peran Tim Sertifikasi Guru dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Sertifikasi Guru Dalam Jabatan.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan sertifikasi guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Kubu Raya, seperti yang terdapat dalam buku pedoman sertifikasi harus diteruskan kepada guru. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana, keakuratan informasi menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Kubu Raya. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal ini terlihat pada para implementor sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Kubu Raya. Hal ini diungkapkan oleh salah satu Guru yang belum bersertifikasi Negeri di Kabupaten Kubu Raya (Hasil wawancara : 25 Mei 2012) menyatakan sebagai berikut :

“Seharusnya tim sertifikasi guru tingkat Kabupaten Kubu Raya lebih terbuka dimulai dari sosialisasi, verifikasi data, sampai penetapan peserta sertifikasi guru, sehingga peserta sertifikasi yang masuk kuota dalam tahun itu betul-betul peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru, tidak berdasar pada faktor kedekatan dengan tim sertifikasi guru”

Hal ini yang harus menjadi perhatian dari pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, sehingga pelaksanaan sertifikasi guru yang dilaksanakan setiap tahun betul dilaksanakan secara professional.

2. Guru belum Mempunyai Kualifikasi Akademik Sarjana (S1) atau Diploma Empat (DIV).

Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV). Hal ini menjadi penghambat dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan, karena di daerah masih ada guru yang belum sarjana. Dari 653 orang jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kabupaten Kubu Raya, sudah sertifikasi sebanyak 469 orang, terdapat 55 orang guru (8,4%) yang belum berkualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV), Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 mereka yang 55 orang guru (8,4%) belum dapat mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan. Maka yang 55 orang guru (8,4%) yang belum berkualifikasi akademik sarjana (S1) merupakan faktor penghambat untuk pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya.

Pendidikan yang dimiliki guru merupakan hal penting karena sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran agar mencapai sasaran yang diinginkan. Sasaran tersebut diharapkan sesuai dengan standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang harus dicapai siswa. Artinya materi yang ditentukan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang dapat menunjang tercapainya standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Hasil wawancara salah satu guru yang sudah disertifikasi bahwa pengelolaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan cara

materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berkaitan dengan pemilihan materi pembelajaran adalah jenis, cakupan, urutan dan perlakuan terhadap materi pembelajaran tersebut. Lalu guru membuat persiapan yang berdaya guna dan berhasil guna, dituntut memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan materi pembelajaran, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip, maupun prosedur pengembangan materi serta mengukur efektivitas persiapan tersebut.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara dari beberapa sumber seperti Pengawas, Kepala Sekolah, Guru, ketua tim sertifikasi, menyatakan bahwa untuk menentukan ruang lingkup materi pembelajaran guru kurang memperhatikan aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, prosedur), aspek afektif dan psikomotor, sebab pelaksanaan proses pembelajaran tiap jenis uraian materi memerlukan strategi dan media pembelajaran yang berbeda. Disamping jenis materi guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan ruang lingkup materi, artinya menggambarkan berapa banyak materi yang dimasukkan ke dalam materi pembelajaran. Karena kedalaman materi juga menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung didalamnya yang dipelajari oleh siswa.

Hasil temuan di lapangan dan didukung dengan hasil observasi menunjukkan bahwa berbagai sumber belajar di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran. Penentuan tersebut harus tetap mengacu pada setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan. Adapun sumber belajar seperti : Modul, buku, jurnal (hasil penelitian dan pemikiran ilmiah), majalah ilmiah, karya tulis, internet dan multimedia.

Seiring dengan hal tersebut, salah satu guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya memberikan pernyataan dari hasil wawancara bahwa penyusunan silabus diwajibkan pada seluruh guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Cara yang dilaksanakan sebagai berikut : (1) Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan semua alokasi waktu yang ada untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (2) Silabus disusun dengan memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang serumpun, (3) Pelaksanaan pembelajaran per semester dengan menggunakan penggalan silabus sesuai dengan kompetensi dasar yang terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk tiap mata pelajaran dengan alokasi waktu yang ada pada kurikulum.

Kemudian didukung oleh pernyataan Kepala sekolah bahwa pengembangan silabus sudah dilaksanakan oleh guru secara mandiri atau melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Penyusunannya dilakukan secara mandiri oleh guru jika guru mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah dan lingkungannya. Jika guru mata pelajaran belum dapat melakukan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan membentuk kelompok kerja guru mata pelajaran atau serumpun.

3. Masa Kerja Guru Kurang dari 4 Tahun sebagai PNS

Didalam pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) tahun 2009, menyatakan bahwa persyaratan uji sertifikasi melalui penilaian portofolio memiliki masa kerja sebagai guru baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) minimal 4 tahun pada satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang bersangkutan telah menjadi guru.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi diperoleh data guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya dari 653 orang guru terdapat 102 (15,62 %) orang guru yang masa kerjanya dibawah empat tahun. Hal ini merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kubu Raya.

Konsekuensi dari dua faktor penghambat diatas, kuota untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak dapat dipenuhi. Pada hal kesempatan yang diberikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi guru dalam jabatan pasal 4, menyatakan :

- (1) Menteri Pendidikan Nasional menetapkan jumlah dan kuota peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan tiap tahunnya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menentukan peserta sertifikasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (3) Untuk menentukan peserta sertifikasi berpedoman pada kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).

Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan tiap tahunnya pada tiap Kabupaten ditentukan Oleh Menteri Pendidikan Nasional. Kuota peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2008 dan 2009 lebih besar dari jumlah guru yang memenuhi persyaratan karena guru belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana atau Diploma IV (D IV) dan masa kerja kurang dari 4 tahun , ini dijelaskan oleh anggota Tim Sertifikasi Kabupaten Kubu Raya (wawancara tanggal 26 Mei 2012) yaitu :“ Peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2010 dan 2011 tidak tercapai target sesuai kuota yang diberikan pemerintah pusat, Jumlah guru sebagai peserta sertifikasi yang memenuhi syarat kurang dari kuota yang ada. Ada dua alasan utama, yaitu guru belum berkualifikasi sarjana (S1) dan masa kerja guru dibawah empat tahun. Jumlah guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Kubu Raya 653 orang, yang telah lulus sertifikasi jumlahnya 469 orang dan yang belum sertifikasi 157 orang, sedangkan target pemerintah tahun 2014 semua guru harus telah disertifikasi”

Sertifikasi pendidikan yang dimiliki oleh guru merupakan simbol bahwa guru harus terus mengabdikan keahlian dan kompetensinya sebagai guru yang profesional. Tunjangan profesi yang diperoleh tiap bulannya menjadi motivasi agar guru dapat meningkatkan profesionalisme. Selain itu, tunjangan profesi tersebut dapat meningkatkan performan sebagai guru yang terus berkembang sesuai kebutuhan siswa dan kemajuan pendidikan bangsa. Berdasarkan pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, selain diberhentikan, tunjangan profesi akan dibatalkan dan guru sebagai pihak penerimanya wajib mengembalikan semua tunjangan profesi yang telah diterimanya. Bahwa guru yang sudah disertifikasi mendapat tunjangan sebulan gaji pokok dengan perhitungan masa kerja. Hasil wawancara dengan dari Kabid Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyatakan bahwa sumber dana untuk membayar tunjangan profesi bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan provinsi. Kriteria tunjangan profesi diberikan pada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru dan yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dari Direktorat Jendral

PENUTUP

Analisis dan pembahasan yang telah di paparkan memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Kubu Raya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini terlihat dari aktivitas yang sudah dilakukan seperti sosialisai, melakukan seleksi peserta, penyusunan portofolio, verifikasi berkas dan penerimaan tunjangan profesi, belum dilaksanakan dengan baik.
2. Tim sertifikasi guru yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya belum melaksanakan tugas dengan baik. Hal tersebut terlihat belum dilakukan pembinaan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan.
3. Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya, belum menunjukkan perubahan kearah lebih baik . Hal tersebut terlihat belum memberikan dampak positif pada peningkatan kualitas akademis maupun non akademis, seperti meningkatkan guru lebih profesional, dan kesejahteraan guru.
4. Faktor pendukung program sertifikasi guru dalam jabatan adalah keterlibatan tim sertifikasi guru Kabupaten Kubu Raya dalam memberikan bantuan mengenai proses sertifikasi guru dalam jabatan, dan motivasi guru untuk menerima kebijakan sehingga ada usaha guru untuk meningkatkan kualitas guru.
5. Faktor penghambat yang mempengaruhi sertifikasi guru dalam jabatan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Kubu Raya, adalah peran tim sertifikasi guru dalam jabatan, kualifikasi pendidikan masih ada yang belum sarjana (S1) dan masa kerja guru kurang dari 4 (empat) tahun.
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Kubu Raya, seharusnya langkah-langkah pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dilakukan dengan prosedur pelaksanaan yang sesuai.
7. Untuk meningkatkan peran tim sertifikasi guru, perlu melakukan optimalisasi pemenuhan standarisasi dan prosedur dengan menambah tenaga yang kompeten untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga program sertifikasi guru dapat berjalan sesuai dengan prosedur pelaksanaan.
8. Untuk peningkatan perubahan kualitas akademis maupun non akademis terhadap guru, seperti meningkatkan guru lebih profesional, perlu dilakukan pembinaan yang intensif terhadap guru yang telah disertifikasin agar peningkatan kesejahteraan guru lebih terjamin.
9. Pemberian motivasi terhadap tim sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya agar meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan terhadap guru pada proses pelaksanaan sertifikasi guru terutama dalam hal sosialisasi, verifikasi berkas dan penyeleksisn peserta sertifikasi kepada kepala sekolah dan guru yang masuk kuota sertifikasi, sehingga kinerjanya lebih profesional.
10. Tim sertifikasi guru harus lebih mengintensifkan sosialisasi pada kepala sekolah dan guru, supaya mengetahui sertifikasi guru bukan hanya mendapatkan tunjangan profesi tetapi juga adanya peningkatan kualitas guru lebih profesionalisme, sehingga ilmu pengetahuan yang diberikan pada siswa dapat dilakukan sesuai dengan tujuan

pendidikan nasional, serta pengawas perlu meningkatkan kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas, seperti melakukan secara rutin monitoring dan kinerja guru yang sudah disertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, Suharsimi, (1991) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta : Rieneka Cipta
- Azwar (2002) *Penelitian Kebijakan*, Makalah disampaikan pada pertemuan peneliti Melayu Muda di Johor, Malaysia.
- Barnes, Tony, (1997) *Kaizen Strategis For Succesful Leadership*, (Terjemahan), Jakarta : Interaksa
- Darwin, Muhajir (2001) *Implementasi, Kebijakan, Pelatihan Teknik Manajemen, Kebijakan Publik*. Yogyakarta UGM
- Ditjen PMPTK, (2009) *Dasar-dasar Administrasi Pendidikan*. Jakarta : Depdikbud Dikti
- Dunn, W, (2000) *Manajemen Analisis Kebijakan Publik*. (edisi kedua). Gajah Mada University Press Yogyakarta.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (2010) *Profil Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya (2010) *Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*.
- Hamalik, O. (2004) *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Pustaka Martina.
- Nawawi, Hadari (1991), *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan*, Jakarta.
- Joni Indra (2008) *Landasan Pendidikan* <http://www.scribd.com/doc/8617327/>
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 56/0/2007 tentang *Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru*
- Muhammad Ali (Tanpa Tahun) *Kamus Lengkap Bahasa Modern*. Jakarta : Pustaka Amani.
- Moh, Uzer Usman, (2005) *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Mattew B dan Huberman A, Michael, (1992) *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia
- Moleong, Lexi, J. (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muharjir, H. Neong (2000) *Metode penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Edisi IV, Rake Sarasin.
- Muslich M, (2007) *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nazir. Moh. (1999:149) *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Islamy, M,Irfan, (2001) *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Nawawi, Hadari (1991) *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan*, Haji Masagung, Jakarta.
- Putra, Fadillah (2001) *Pradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 *Tentang Guru*

Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2009 *Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya*

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 *Tentang Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 *tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2009 *tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan*

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 *Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.

Ridwan, (2004) *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung Alfabeta.

Sujana. (1989) *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Sinar Baru.

Sagala, Syaiful (2009) *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono, (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sujanto, Bedjo (2009) *Cara Efektif Menuju Sertifikasi Guru*, Jakarta : Raih Asa Sukses

Soerapta, Riyadi, HR, (2000) *Perencanaan Evaluasi Publik*. Malang: Un Press Malang

Subarsono, (2005) *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Thamrin (1997) *Kebijakan Negara suatu Pengantar*. Pontianak : Fisipol Untan.

Tilaar. (2002) *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

U. Husna Asmara, (2004) *Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak : Hanura bahagia.

Wahab, Saleh (1996) *Manajemen pendidikan*. Jakarta : Pradnya Paramita

Wahab, Abdul Solihin (1997) *Analisa Kebijakan*, Jakarta : Buni Aksara

Wibawa, samodra (1994) *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Jakarta : Intermedia

Peraturan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, Sinar Grafika, 2006.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Sinar Grafika, 2006.

BIO DATA PENULIS



WIDIYAKA, S.Pd, M. Si, lahir di Klaten, 26 Juli 1970. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada SD Negeri Trunuh I Kebonarum, tahun 1983; Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri 1 Kebonarum, tahun 1986; Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas pada SMA Muhammadiyah I Klaten, tahun 1989. Gelar Sarjana (S-1) diperoleh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember, pada tahun 1995. Dan gelar Magister (S-2) diperoleh dari Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura Pontianak pada tahun 2013.

Riwayat keluarga, anak ke-dua dari 4 (empat) bersaudara bernama Ir. Winarno, Widanarti, Rochmat Widiyatmo, A.Md.Par,. Memiliki orang tua bernama Radjiman Widosuparto dan Sulastri. Istri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di MTs Negeri 2 Pontianak bernama Karningsih, S.Pd. Serta memiliki 3 (tiga) orang anak bernama Arwika Hanif, Arwina Nurul Lailiya, Arwidha Artridinna.

Perjalanan karirnya dimulai dari Guru SMP Negeri 1 Sungai Raya Kabupaten Pontianak tahun 1999-2002. Guru SMP Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Pontianak tahun 2002-2005. Kepala SMP Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Pontianak tahun 2005-2007. Kepala SMP Negeri 6 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya tahun 2007-2009. Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-sekarang.,